

**Ditjen Bina Konstruksi Menggandeng Ditjen Bina Marga dan ASPABI Melaksanakan Pemantauan
Penggunaan Asbuton di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mendorong penggunaan Asbuton pada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, Kementerian PUPR menerbitkan regulasi sebagai upaya menjadikan Asbuton sebagai raja di negeri sendiri, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Asbuton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35 Tahun 2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Asbuton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan. Hal ini mewujudkan betapa tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Material Asbuton merupakan material lokal sumber daya alam asli Indonesia dengan cadangan deposit sangat besar mencapai 667 juta ton yang mesti kita dorong terus penggunaannya, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Asbuton memiliki keunggulan mutu yang lebih baik dari aspal minyak. Dengan menggunakan Asbuton, diperkirakan dapat menghemat devisa dikarenakan tingkat impor aspal minyak yang tinggi. Penggunaan Asbuton juga mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebagai wujud upaya menuju kemandirian bangsa, dimana Asbuton olahan memiliki nilai TKDN berkisar 78,28%-86,49% yang jauh lebih tinggi daripada aspal minyak impor.

Selanjutnya, sebagai upaya mengidentifikasi sejauh mana implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tersebut, Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi melakukan pemetaan data dan informasi terkait kinerja rantai pasok material Asbuton, dalam hal ini kesiapan industri pengolahan Asbuton untuk dapat memenuhi kebutuhan



Gambar 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud memantau kinerja AMP yang Dimodifikasi Untuk Asbuton di Konawe, Sulawesi Tenggara.

penggunaan Asbuton pada paket-paket pembangunan dan preservasi jalan di Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Bina Marga. Pemantauan ini menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan infrastruktur, dimana ketersediaan sumber daya material konstruksi khususnya material Asbuton harus menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara konstruksi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan proyek.

Pemantauan dilakukan pada bulan Desember 2020 dengan berkolaborasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, dan Asosiasi Pengembang Asbuton Indonesia (ASPABI). Lokasi pemantauan dilakukan di 3 (tiga) lokasi berbeda, yaitu Kota Makassar-Sulawesi Selatan, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, dan Pulau Buton-Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, Tim Pemantauan melakukan



Gambar 2. Spesimen Asbuton di Tambang Lawele, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

kunjungan lapangan ke PT. Wika Bitumen, PT. Kartika Prima Abadi, dan Pelabuhan Nambo. Catatan hasil pemantauan di 3 (tiga) lokasi tersebut yang dilaporkan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi disampaikan dapat disimak pada penjelasan dibawah ini.

1. Isu strategis yang dapat dirangkum, diantaranya:

- a. Pada kunjungan lapangan ke Makassar dan Kendari, didapatkan informasi realisasi per November 2020, penggunaan Asbuton di proyek BBPJM Sulawesi Selatan mencapai 96,97% (4.837 ton), kemudian penggunaan Asbuton (B50/30) di proyek BPJM Sulawesi Tenggara mencapai 76,53% (3.167 ton) dan penggunaan CPHMA mencapai 47% (2.436 ton). Kendala penggunaan Asbuton diantaranya dibutuhkan teknologi tambahan pada *Asphalt Mixing Plant* (AMP) untuk mengolah Asbuton sebelum dicampur dengan aspal minyak, sehingga menambah biaya produksi.
- b. Sedangkan pada kunjungan lapangan ke Pulau Buton, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:
 - i. masih terdapat permasalahan logistik berupa sarana dan kapasitas pelabuhan di Pulau Buton yang masih belum memadai sehingga proses *loading-unloading* Asbuton dengan kapal ukuran tonase besar tidak optimal;

- ii. produsen Asbuton mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan produksi (*made by order*) yang disebabkan masih belum pastinya informasi permintaan kebutuhan/*demand* Asbuton;
 - iii. telah dibangun fasilitas produksi Asbuton murni/*full extraction* dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 100.000 ton/tahun oleh PT. Kartika Prima Abadi yang rencana akan diresmikan pada bulan Maret 2021.
2. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:
- a. Mengusulkan kepada Ditjen Bina Marga untuk dapat segera menyusun dan menetapkan spesifikasi Asbuton murni/full ekstraksi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan, sehingga produk Asbuton murni selanjutnya dapat diterbitkan Standar Nasional Indonesia/SNI;
 - b. Mengusulkan kepada Ditjen Bina Marga agar penggunaan Asbuton dapat diutamakan untuk diserap pada pembangunan dan preservasi jalan di Pulau Sulawesi karena harganya yang lebih murah;
 - c. Mendorong PT. Pindad (Persero) dapat memproduksi teknologi modifikasi AMP untuk pengolahan Asbuton serta bersama Ditjen Bina Konstruksi memberikan pelatihan terkait AMP modifikasi tersebut;
 - d. Mengusulkan kepada PT. Pertamina agar jalur distribusi aspal minyak perusahaan tersebut dapat digunakan pula untuk mendistribusikan Asbuton;
 - e. Berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong peningkatan penggunaan Asbuton pada proyek pembangunan dan preservasi jalan dengan dana APBD melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun 2021; dan
 - f. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengawasan terhadap kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) yang menurunkan kualitas jalan.

Dengan dilakukannya kolaborasi pemantauan lapangan berkaitan dengan kinerja rantai pasok material Asbuton di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ini yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, baik Ditjen Bina Marga dan ASPABI, dapat melahirkan berbagai kebijakan yang harapannya dapat menjadi solusi terhadap tantangan penggunaan Asbuton yang mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, di Indonesia.

--- 00 ---